

## NORMALISASI HUBUNGAN UNI EMIRAT ARAB-ISRAEL DAN ISU PALESTINA

Simela Victor Muhamad

### Abstrak

*Kesepakatan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel yang diumumkan pada 13 Agustus 2020 telah menyita perhatian media akhir-akhir ini. Amerika Serikat (AS), yang memfasilitasi terwujudnya kesepakatan tersebut, memuji langkah UEA dan Israel sebagai jalan menuju kemajuan Timur Tengah. Sementara, kecaman datang dari Palestina yang menentang keras kesepakatan UEA dan Israel. Melalui tulisan ini dikaji secara singkat hal yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan UEA-Israel dan bagaimana hal itu dikaitkan dengan isu Palestina. Dalam konteks AS, munculnya kesepakatan tersebut terkait erat dengan kepentingan Donald Trump yang kembali maju dalam pilpres AS November mendatang dan kebijakan AS di Timur Tengah yang memihak Israel. Sementara itu, kepentingan ekonomi telah menjadi faktor penentu bagi UEA dan Israel untuk menormalisasi hubungannya. Penolakan Palestina bisa dipahami karena kesepakatan UEA-Israel bisa melemahkan soliditas negara-negara Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, isu kemerdekaan Palestina perlu terus disuarakan masyarakat internasional, termasuk Indonesia, melalui berbagai jalur diplomasi.*

### Pendahuluan

Kesepakatan normalisasi hubungan UEA dan Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020. Hal itu menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga yang membuka hubungan penuh dengan Israel setelah Mesir dan Yordania. Berbeda dari Mesir dan Yordania, Israel tidak pernah berperang melawan UEA. Kesepakatan normalisasi hubungan UEA-

Israel yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Trump pada 13 Agustus 2020 itu dikemukakan keras Palestina yang menyebutnya sebagai “pengkhianatan” terhadap perjuangan mereka. Sebagai bentuk protes atas kesepakatan damai antara UEA dan Israel, Palestina menarik duta besarnya dari Abu Dhabi (cnnindonesia.com., 14 Agustus 2020).

Kecaman keras juga datang dari Iran dan Turki atas normalisasi



hubungan UEA dan Israel yang difasilitasi oleh AS. Keduanya menuding UEA berkhianat atas perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dari Israel (Koran Tempo, 15 Agustus 2020). Sementara pihak AS memuji kesepakatan damai UEA-Israel sebagai 'suatu jalan menuju kemajuan' Timur Tengah. AS berharap negara-negara Arab lain mengikuti jejak UEA (Kompas.com., 31 Agustus 2020). Menarik kemudian untuk dibahas, mengapa muncul kesepakatan normalisasi hubungan UEA dan Israel, serta bagaimana hal itu dikaitkan dengan isu Palestina, karena dapat saja muncul anggapan bahwa dengan adanya kesepakatan antara UEA dan Israel untuk menormalisasi hubungan, isu Palestina seakan dapat dikesampingkan. Kajian singkat ini mencoba membahasnya dan penting untuk diangkat karena terkait dengan prospek stabilitas keamanan di Timur Tengah dan tingkat global, yang antara lain juga ditentukan oleh solusi komprehensif dan adil terhadap pendudukan wilayah Palestina.

### **Kepentingan Trump**

Tidak dapat dibantah bahwa munculnya kesepakatan normalisasi hubungan antara UEA dan Israel berkaitan erat dengan kepentingan Donald Trump sebagai Presiden AS, selain kepentingan Israel dan UEA. Hal itu terlihat dari diumumkannya secara langsung oleh Presiden Trump kesepakatan UEA dan Israel untuk menjalin hubungan diplomatik pada 13 Agustus 2020. Trump yang mengunggah pernyataannya secara bersama melalui cuitan *twitter* dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin

Zayed Al-Nahyan, menyebutkan kesepakatan tersebut sebagai momentum yang sangat bersejarah dan berharap lebih banyak negara Arab mengikuti UEA (thejakartapost.com., 14 Agustus 2020).

Kehadiran Trump secara langsung dalam pengumuman kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel di atas tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Trump menjelang pemilihan presiden (pilpres) AS yang akan digelar pada November 2020. Trump yang sedang berjuang untuk memenangkan kembali pilpres AS membutuhkan dukungan suara, termasuk dari masyarakat AS yang mendukung kebijakannya di Timur Tengah. Dukungan suara itu sangat dibutuhkan Trump di tengah merosotnya popularitas presiden AS itu, yang antara lain disebabkan oleh kebijakannya yang tidak efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 dan meluasnya unjuk rasa terkait rasisme (liputan6.com., 7 Agustus 2020). Trump seakan berjudi bahwa kesepakatan damai UEA-Israel yang diumumkannya akan mengangkat popularitasnya pada pilpres AS mendatang, setidaknya untuk kalangan tertentu, khususnya komunitas Yahudi di AS.

Terlepas dari kepentingan pilpres, dukungan Trump terhadap normalisasi hubungan UEA-Israel, sesungguhnya juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan presiden AS itu terhadap Timur Tengah yang lebih memihak Israel, khususnya dalam isu Palestina. Selama menjabat sebagai presiden AS, Trump kerap mengeluarkan kebijakan unilateral yang merugikan Palestina dan menguntungkan Israel. AS menggunakan hak vetonya terhadap Resolusi DK PBB yang

menolak keputusan Trump soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke kota itu. AS secara aktif melakukan lobi-lobi terhadap negara-negara Arab untuk menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Palestina untuk menerima ibu kota di luar Yerusalem dengan kompensasi miliaran dollar AS, sebagaimana tertuang dalam proposal damai AS yang diusulkan Trump awal tahun 2020.

Akhir-akhir ini, meskipun tidak secara tegas diungkapkan dan masih bersikap hati-hati, pemerintahan Trump seakan tidak menentang rencana terbaru dari Israel untuk menganeksasi sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan milik Palestina yang banyak ditentang masyarakat dunia. Terlihat di sini, kepentingan Trump yang lebih memihak Israel, ditambah dengan kehadiran penasihat senior dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner yang keturunan Yahudi, bisa dipastikan turut memengaruhi dukungan presiden AS itu terhadap normalisasi hubungan Israel-UEA. Israel, yang terjepit di antara negara-negara Arab di Timur Tengah, belum lagi dihadapkan dengan kekuatan Iran, dan terakhir Turki, seakan perlu didukung AS untuk memperluas hubungan dengan negara-negara Arab dengan harapan bisa menekan Palestina. Kepentingan Trump yang lain, sudah tentu, adalah untuk menjaga hubungan baik dengan komunitas Yahudi pro-zionis di AS dan kekuatan bisnisnya.

### **Kepentingan Ekonomi UEA dan Israel**

Hubungan diplomatik resmi Israel dan UEA yang diumumkan Presiden Trump 13 Agustus 2020

dipastikan akan disusul dengan pembukaan hubungan dagang Israel-UEA secara besar-besaran. Israel akan segera menjadi mitra dagang utama UEA dan demikian sebaliknya. UEA sudah sangat berminat membangun hubungan dagang, khususnya di sektor teknologi, dengan Israel. Bahkan sektor ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong UEA membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel meskipun isu Palestina masih jauh dari selesai. Perusahaan UEA, Apex Group, sudah menandatangani kerja sama dengan kelompok perusahaan Israel, Tera, untuk riset dan produksi vaksin Covid-19 (Rahman, 2020).

Sebaliknya, Israel juga sudah sejak lama memiliki impian untuk menembus pasar Arab Teluk yang kaya yang dikenal sebagai pasar terbesar dan terkuat di dunia Arab. Negara-negara Arab Teluk itu tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk atau *The Gulf Cooperation Council* (GCC), yang beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UEA, dan Kesultanan Oman. GCC yang didirikan pada 1981 itu memiliki pendapatan per-kapita rata-rata 34.265 dollar AS atau di urutan ke-25 dunia. UEA sendiri memiliki pendapatan per-kapita 41.476 dollar AS atau berada di urutan ke-19 dunia dan PDB mencapai 432.612 miliar dollar AS. UEA merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia Arab setelah Arab Saudi (Rahman, 2020). Pasar besar UEA dan GCC kini sudah di depan mata Israel. Israel melalui wilayah UEA bisa lebih leluasa bermanuver di sektor bisnis kawasan Arab Teluk yang kaya tersebut.

Terlihat di sini bahwa kesepakatan UEA dan Israel untuk menormalisasi hubungan juga dilatarbelakangi oleh kepentingan

ekonomi, bahkan menjadi faktor yang cukup menentukan. Terlepas dari itu, normalisasi hubungan UEA dan Israel juga sempat dibayangi oleh adanya kesepakatan pembelian pesawat F-35 AS oleh UEA, dan jika hal itu tidak terwujud, UEA mengancam akan menghentikan kesepakatan. Namun, sekali lagi, kepentingan ekonomi tampaknya lebih mengemuka untuk tahap awal pembukaan secara resmi normalisasi hubungan di antara mereka.

### Isu Palestina Tidak Dapat Dikesampingkan

Kesepakatan normalisasi hubungan antara UEA dan Israel yang difasilitasi AS dapat dipahami jika memperhatikan kepentingan yang melatarbelakanginya. Kesepakatan tersebut tidak ada kaitannya dengan perdamaian Palestina. Tidak pula terkait dengan perjuangan Palestina menuju kemerdekaan dari penjajahan Israel. Kesepakatan tersebut sebenarnya terkait dengan Trump yang sedang berusaha memenangkan kembali pilpres pada akhir November nanti, dan juga menjadi bagian dari kepentingan pemerintahan Trump di Timur Tengah. Kesepakatan tersebut juga dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi UEA dan Israel. Dengan demikian, bagaimana kaitannya dengan isu Palestina? Hal inilah yang perlu diungkap agar dapat dipahami mengapa Palestina mengecam keras kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel, dan sebagian besar negara Arab lainnya belum bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika isu Palestina belum teratasi.

Mengaitkannya dengan isu Palestina dapat dipahami, karena tatanan dunia Arab dalam konflik

Arab-Israel masih mengacu pada Proposal Damai Arab tahun 2002 yang digagas Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. Proposal Damai Arab itu menegaskan kesediaan dunia Arab dan Islam membuka hubungan diplomatik secara kolektif dengan Israel, dengan imbalan berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Yerusalem Timur. Proposal Damai Arab tersebut sudah seharusnya menjadi pijakan bagi negara-negara Arab dalam merespons isu Palestina. Posisi sebagian besar negara Arab hingga saat ini masih mengacu pada Proposal Damai Arab tahun 2002, meskipun dalam perkembangannya, dan pada saat yang bersamaan, lobi-lobi Yahudi terus berusaha membujuk sejumlah negara Arab agar bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam kasus UEA, lobi Yahudi tampaknya berhasil.

Dengan latar belakang di atas, terutama jika mengacu pada Proposal Damai Arab 2002, adalah wajar jika Palestina sangat kecewa dengan langkah UEA yang meresmikan hubungan diplomatiknya dengan Israel. Dari sisi strategi politik, terlepas dari kepentingan masing-masing negara Arab, hal tersebut seakan memperlihatkan tidak adanya soliditas dari negara-negara Arab untuk mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Palestina. Bagi Palestina, yang wilayah kedaulatannya semakin tergerus oleh aneksasi Israel, kehadiran dan soliditas negara-negara Arab tetangganya dalam mendukung perjuangan kemerdekaannya sangat dibutuhkan. Dalam menghadapi Israel yang telah merampas wilayah kedaulatannya, dan sudah tidak lagi memedulikan resolusi-resolusi

DK PBB terkait solusi damai Timur Tengah, maka satu-satunya kekuatan Palestina adalah dukungan penuh masyarakat internasional untuk menekan Israel, khususnya dari negara-negara Arab Timur Tengah.

Terjadinya kesepakatan damai antara negara Arab dan Israel yang disusupi oleh kepentingan Israel untuk menguasai wilayah Palestina secara ilegal dapat melemahkan posisi dan perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya. Dalam kerangka berpikir seperti inilah, Palestina dan masyarakat internasional yang mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Palestina mengecam keras terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan antara UEA dan Israel. Oleh karena itu, isu Palestina tidak dapat dikesampingkan begitu saja di tengah kesepakatan UEA dan Israel. Isu kemerdekaan Palestina perlu terus disuarakan oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, melalui berbagai forum internasional. Parlemen, termasuk DPR RI, harus menjadi bagian dari masyarakat internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

### Penutup

Kepentingan AS, UEA, dan Israel secara jelas telah melatarbelakangi disepakatinya normalisasi hubungan UEA dan Israel. Kepentingan AS terkait dengan rencana Trump yang sedang berusaha memenangkan kembali pilpres AS dan kebijakannya di Timur Tengah yang lebih memihak Israel. Sementara, kepentingan ekonomi telah menjadi faktor penentu bagi UEA dan Israel untuk meresmikan hubungan diplomatiknya.

Bagi Palestina, kesepakatan normalisasi hubungan UEA dan Israel dapat melemahkan soliditas dukungan negara-negara Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, isu kemerdekaan Palestina di atas wilayah kedaulatannya perlu terus disuarakan oleh masyarakat internasional, termasuk oleh Indonesia. Melalui peran diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI, Indonesia harus terus menyuarakan isu kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan parameter lain yang disepakati secara internasional.

### Referensi

- “Iran dan Turki Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel”, *Koran Tempo*, 15 Agustus 2020, hal. 6.
- “Israel-UEA Mulai Penerbangan Langsung”, *Republika*, 1 September 2020, hal. 4.
- “Israel Siapkan Kerja Sama Ekonomi dengan Uni Emirat Arab”, *tempo.co.*, 30 Agustus 2020, <https://dunia.tempo.co/read/israel-siapkan-kerja-sama-ekonomi-dengan-uni-emirat-arab/>, diakses 2 September 2020.
- “Kecewa Kesepakatan Israel, Palestina Tarik Dubes dari UEA”, *cnnindonesia.com.*, 14 Agustus 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/kecewa-kesepakatan-israel-palestina-tarik-dubes-dari-uea/>, diakses 2 September 2020.
- “Penasehat Sekaligus Menantu Trump, Jared Kushner Puji Kesepakatan Damai Israel-UEA”, *Kompas.com.*, 31 Agustus 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/31/penasihat-sekaligus-menantu-trump->

jared-kushner-puji-kesepakatan-damai/, diakses 2 September 2020. Rahman, Musthafa Abd., "Interaksi Iran-Israel di UEA", *Kompas*, 31 Agustus 2020, hal. 3.

"Survei Terbaru Pilpres AS: Joe Biden Ungguli Donald Trump 2 Kali Lipat di California", *liputan6.com*, 7 Agustus 2020, <https://www.liputan6.com/global/read/4325065/survei-terbaru-pilpres-as-joe-biden-ungguli-donald-trump-2-kali-lipat-di-california/>, diakses 2 September 2020.

"Trump says to host Mideast deal signing in three weeks", *thejakarta post.com*, 14 Agustus 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/14/trump-says-to-host-mideast-deal-signing-in-three-weeks.html/>, diakses 2 September 2020.



Simela Victor Muhamad  
[simela.muhamad@dpr.go.id](mailto:simela.muhamad@dpr.go.id)

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016); "Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); "Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan" (bagian dari buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan "*Proxy War* dalam Konflik di Lebanon" (bagian dari buku *Proxy War* di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.